



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 20 (Dua Puluh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dirut PT. Bank BNI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 26 November 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d 17.26 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A.
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020
Hadir : DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG):

... (KASET 1 REKAMAN RUSAK) ...

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Juga menyasar konsumen-konsumen atau calon nasabah potensial di sector pertanian, mereka datang saja. Lebih spesifik lagi disini disinggung kartu tani, di Jawa Tengah khususnya Dapil saya Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, kartu tani ini dikeluhkan banyak masyarakat karena mereka habis waktu berurusan dengan bank. Saya memang tidak mempelajari secara khusus ya, apakah memang benar tetapi secara umum mereka mengeluh karena menghabiskan waktu yang produktif bagi mereka. Kalau ini dikaitkan dalam Laku Pandai saya pikir sangat tepat, karena kartu tani ini menjadi titik lemah dikalangan para petani karena kartu tani bukannya membantu tapi bahkan malah mengurangi produktifitas mereka.

Dari saya itu saja Pimpinan dan Bapak Baiquni, sekali lagi terima kasih atas sinergi selama ini BNI. Dan ke depan harapan kami tentunya kita bisa meningkatkan kerja sama ini lebih baik lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Puteri Komarudin, kemudian siap-siap Bapak Ramson Siagian.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Baiquni berserta jajarannya.

Yang pertama saya ingin tanyakan adalah mengenai aspirasi 2010 BNI, yaitu ekspansi bisnis melalui pengembangan model bisnis digital dan ekosistem. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita membicarakan tentang digital itu berarti ada *human resources* yang fungsinya digantikan oleh teknologi. Yang kita tahu banyak bank-bank besar sekarang menutup cabang-cabang dimana-mana karena memang biaya *over head*-nya terlalu besar disitu sehingga akan lebih efisien apabila mereka memfokuskan ke cabang yang memang provitable dan lalu pelayanannya digantikan dengan system digital. Apakah impact dari digitalisasi tersebut terhadap *human resources* di BNI, apakah mereka yang tergantikan teknologi jadi trend lagi atau

distribusikan ke tempat-tempat lain atau divisi-divisi lain atau seperti apa. Karena kita tahu banyak sekali anak-anak muda jaman sekarang juga merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan karena saingannya sekarang sudah bukan manusia saja tetapi teknologi. Jadi bagaimana strategi BNI melihat perkembangan teknologi ini. Ini yang pertama.

Terus yang kedua, itu terkait dengan pembobolan dana nasabah di BNI Cabang Ambon. Yang kita tahu sempat ramai juga di koran dan melibatkan 3 kepala cabang pembantu. Jadi terkait dengan kasus ini karena yang berlaku seperti itu adalah kepala cabang yang merupakan pimpinan tertinggi disitu, bagaimana kiat BNI untuk meningkatkan efektifitas dari pengawasan internalnya. Karena kita tahu di cabang Kepala Cabang itu sebenarnya sudah seperti raja kecil, karena yang menjaga operasionalnya adalah mereka dan jangan sampai ada praktek bank adlam bank yang akhirnya menjalar kemana-mana. Inikan indikasi tidak baik di daerah seperti itu dan Ambon juga merupakan kota besar. Jadi apa saja strategi yang teah dilakukan oleh BNI untuk mencegah hal ini terjadi di cabang-cabang lain.

Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang perkembangan rsetrukturisasi kredit yang diberikan kepada dunia tax. Ini nanti jawabannya tertulis saja karena tidak mungkin dijawab di forum terbuka saja, tetapi kita ingin tahu karena itu kasusnya juga lumayan besar. Dan selanjutnya juga seberapa signifikan program yang diterapkan BNI dalam mendukung pengembangan smart city, karena kita tahu disini ada sociality, digital loan buat UMKM. Sementara kita tahu inklusi keuangan kita masih dalam taraf rendah, literasi keuangan juga mungkin ada pendampingan dari BNI ataupun training untuk warga atau seperti apa sehingga program-program seperti ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena ide-ide bagus itu banyak cuma kadang-kadang yang susah implementasi dilapangan. Jadi saya tahu dengan berbagai e-strategi yang sudah ada ini kita semua ingin mengoptimalkan fungsinya kepada masyarakat. Jadi strategi apa saja yang akan dilakukan untuk *make sure* kalau strategi-strategi ini bisa diterima dengan baik.

Dan yang terakhir adalah, BNI adalah termasuk dalam bagian bank-bank yang meyalurkan Bansos. Dan kita tahu program-program seperti PKH dan yang lainnya juga banyak problem pada distribusinya terutama di daerah Indonesia timur. Jadi yang ingin kita tanyakan adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh BNI selama menjadi distributor dari program tersebut dan apa yang bisa kita batu dari sisi DPR RI dan dari sisi pengawasan, Mungkin nanti rekomendasi untuk Pemerintah agar kedepannya semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaat dari program ini, terutama di daerah yang memang mereka sangat membutuhkan program-program bantuan Pemerintah.

Jadi sekian dari saya.

Terima kasih banyak.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Sudah Ibu Puteri? Baik, terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Ramson Siagian, siap-siap yang terhormat Ibu Vera Febyanthy.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Bapak Ketua dan rekan-rekan yang terhormat,
Bapak Dirut Bank BNI dan para Direksi jajarannya yang saya hormati.**

Disini Bapak Dirut BNI pertama saya mau angkat hal asumsi makro yang disampaikan dari sisi proyeksi analisis BNI. Disini antara lain, bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5%-5,2% proyeksi BNI, dengan BI seven date rate 4,5%-5%. Artinya ada penurunan acuan suku bunga dari BI. Tetapi saya mendengarkan bahwa BNI real bunga kreditnya masih tinggi sekitar 18%. Saya mendengarkan seperti itu, memang kalau misalnya kredit yang angsuran flat disebut 10% tetapi secara emitted itukan bisa sekitar 18% riil bunganya. Itu nanti tolong dijelaskan bagaimana untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% dengan perlambatan ekonomi global dan juga ekonomi domestic sekarang ini, kalau tidak didorong dengan penyaluran likuiditas yang lebih cepat dan juga dengan bunga kredit yang lebih rendah. Karena kita sekarang artinya bahwa dari sector demand juga perlu ditingkatkan memberikan kredit kepada konsumen agar bisa misalnya yang tadinya penghasilannya agak tanggung-tanggung baru membeli kalau dia mendapatkan kredit dari sisi suplay para pengusaha-pengusaha, baik di sector apapun dia memerlukan bunga yang rendah sehingga bisa meningkatkan supply. Peningkatan dari sisi supply dan demand ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro ekonomi.

Jadi sebenarnya saya juga menyampaikan sama Perbanas dan juga kemarin Himbara dan sebagainya itu agar mengikuti apa acuan bunga yang diajukan oleh BI. Artinya, ada acuan suku bunga dari BI, kan sudah turun sekian banyak point seharusnya ada penyesuaian dari BNI. Nanti tolong dijelaskan berapa persen sekarang riil suku bunga yang diberikan oleh BNI kepada para sector riil.

Terus yang saya lihat juga disini bahwa dari loan yang diberikan disini ada sekitar ke industry manufaktur hanya sekitar 20% berarti ini kita memang Indonesia secara umum saya melihat bahwa ada the industrialisasi, artinya kurang mendorong pertumbuhan di sector industry manufacturing. Sehingga apa? Produk-produk dari luar terutama dengan adanya sekarang free trade area, ada Asean Free Trade Area, Asean China Free Trade Area, sehingga tidak ada custome lagi, tidak ada block lagi, bebas sepanjang produknya itu kompetitif. Mereka keunggulan komparatifnya lebih

unggul daripada kita, misalnya dari Vietnam kalau dulu Cina 20 tahun lebih menguasai produk-produk yang keunggulan komparatif sehingga produk mereka menguasai pasar global, baik di Amerika dan Eropa 20 tahun lebih Cina pertumbuhan ekonominya double digit. Sekarang sudah diganti oleh Wietnam, Banglades dan lain sebagainya. Tapi kita kurang kompetitif juga, sebenarnya kita tidak memerlukan keunggulan kompetitif yang produknya *high technology* seperti ini, tetapi yang keunggulan komparatif. Keunggulan mkomparatif antara lain perlu yang bunganya rendah, tenaga buruh artinya gajinya agak rendah juga, sehingga produknya itu agak murah, biarpun bukan produk-produk yang tidak *high technology*. Ini yang memang kita kurang, ini sector perbankan, bank pelaksana harus kerja sama dengan bank sentral pembuat kebijakan fiskal sama pembuat kebijakan non fiskal agar itu bisa *match*. Kalau tidak nanti saya khawatir dengan perlambatan ekonomi global ini proyeksi pertumbuhan ekonomi 5%-5,2% ini tidak akan tercapai. Nah, ini sekarang yang menjadi masalah karena bank pelaksana juga berusaha mencari untung sebesar-besarnya.

Terus yang ketiga disini ada Pak Dirut Non Performing Loan 0,9%. Pra Perfrming Loan 3,4% tolong nanti dijelaskan kok ada pra-nya 3,4% dan ada yang NPL-nya 0,9%. Tadi Bank Mandiri NPL-nya itu sekitar untuk tahun 2019 2,5%-3% Tapi kalau BNI 0,9% luar biasa artinya mantap. Tapi saya lihat disini ada pra NPL-nya 3,4% maksudnya apa ini nanti tolong dijelaskan karena persoalannya kita kurang jelas apa maksudnya.

Terus pinjaman yang disini saya lihat antara simpanan nasabah dengan kebetulan saya tadi pagi saya buka ini yang dikirim melalui WA. Obligasi Pemerintah ada 86 triliun. Ini saya melihat bahwa bank Pemerintah dan bank swasta juga cukup banyak memberikan kredit kepada Pemerintah. Memang ini juga persoalan bangsa ini bahwa tahun 2016 waktu saya debat di TV saya sudah prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi sampai habis periode pertama Pemerintahan Jokowi hanya akan disekitar 5% tidak bakal 7%.

Sekarang kalau saya lihat nanti kombinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam arti pelaksanaan dilapangan tidak langsung di *adjust*. Saya melihat juga pertumbuhan ekonomi sekitar 5% saja apalagi dengan perlambatan ekonomii global. Nah, ini peranan bank-bank pelaksana sangat menentukan untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Terus yang berikutnya, tadi kalau di pra NPL ini tolong dijelaskan nanti ini penyebabnya apa. Terus ada lagi satu tadi disini saya ada dapat data bahwa ada kredit yang tidak bisa ditagih, itu ada berapa banyak, karena saya lihat juga jumlahnya sangat besar. Terus ada juga disini tadi ada data bahwa ini tolong dijelaskan Bapak Dirut, ada satu disini di dalam laporan BNI yang ini. Beban operasional lainnya 21,7 triliun tetapi disini pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai 7,3 triliun 33% dari beban operasional. Nah, ini nanti tolong dijelaskan maksudnya apa ini. Apakah ini karena memang banyak sekarang penghapusan piutang oleh bank-bank, itu katagori penghapusan piutang itu bagaimana, tolong nanti dijelaskan Pak Dirut. Memang disinikan laba tahun berkalan 15 triliun ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, secara ini dia konstan dia naik,

cuma saya ingin penjelasan mengenai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Karena kalau itu tinggi tetapi bunga tinggi hanya untuk mengamankan yang seperti ini. Jadi in efisiensi membuat tidak bisa menyesuaikan suku bunga acuan dari bank sentral. Akhirnya apa? Sector riil tidak bisa kita dorong untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk artinya menghadapi perlambatan ekonomi global sehingga selalu para baik dari OJK, Bank Indonesia, sekarang bank pelaksana, Mandiri, BNI, kemarin Himbara, bicaranya selalu perlambatan ekonomi global, perang dagang Cina dan Amerika, itukan di eskternal. Padahal kita kalau kita konsolidasikan ekonomi domestic sebenarnya cukup besar dengan penduduk 250 juta, cukup besar sebenarnya. Nah, ini sebenarnya harus dikelola tapi kalau dikit-dikit kita carikan kambing hitam ini yang repot.

Saya bilang tadi saya sampaikan tadi ke Plt. Dirut Bank Mandiri agar direksi-direksi bank pelaksana artinya berkoordinasi dengan Bank Indonesia sama OJK dan sama pembuat kebijakan fiskal Menteri Keuangan harus juga ada kordinasi, karena mereka juga harus, artinya berupa menekan bank pelaksana juga untuk memberli obligasi Pemerintah, padahal ini perlu disalurkan kredit kepada sector riil untuk mendorong pertumbuhan sector ekonomi. Karena kalau dalam keadaan perlambatan ekonomi global kita perlu suntikan kepada sector riil agar pertumbuhan ekonomi lebih kencang.

Sementara itu saja, sebenarnya ini ratio-ratio-nya cukup lengkap data-datanya. Cuma ini kalau dikupas Pak Ketua, cukup lama. Saya yang kepentingan rakyat banyak saja, seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari sisi itu saja dan juga memaan ini peranan Bapak Erlangga Menko Perekonomian juga sangat penting. Karena kebijakan-kebijakan non fiskal banyak juga dikeluarkan oleh Menko Perekonomian. Seperti dulu jaman Bapak Nasution, Bapak Darmin, paket satu sampai paket 12 itu namanya kebijakan non fiskal cuma ini sesuai tidak, artinya bisa *match* tidak dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sama kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral, karena belum tentu jalan ke bawah. Artinya ke bank pelaksana ke sector riil dilapangan.

Nah, ini Bapak Baiquni sebagai Bapak Dirut kalau saya melihat dari sisi kepentingan bangsa saja, kepentingan nasional bagaimana. Karena hanya kadang-kadang kiata retorika cari kambing hitam bahwa kesalahan diluar padahal kita tidak tahu kekuatan di dalam luar biasa besar. Kalau Bung Karno bilang ini Pak Sotarduga, ada teori kenetik ada kekuatan didalam ini kalau didentumkan ini besar. Itu mungkin belum baca bukunya semua Bung Karno, kebetulan beliau PDI Perjuangan jadi saya minta supaya dibaca lebih banyak. Kalau dulu sudah saya baca 95% buku-buku beliau.

Jadi termasuk soal kenapa Cina sekarang terus masuk keluar modalnya, ada juga bukunya itu tahun 1935, bukunya tahun 1933 malah, Indonesia menggugat, sudah ada itu Pak Dito. Beliau saya kasih tahu supaya lebih didalami karena kewajibannya sebagai PDI Perjuangan.

Semeta itu Bapak Dirut BNI, tolong yang tadi pertanyaan saya tidak sulit-sulit tolong dijelaskan. Tetapi yang saya harapkan ada kordinasi antara Direksi bank-bank pelaksana dengan bank sentral dan juga pembuat kebijakan fiskal sama

pembuat kebijakan non fiskal. Agar bisa target pertumbuhan ekonomi ini tercapai. Kalau ini tidak berbahaya, tidak bisa tercapai dalam keadaan sekarang terjadi pelambatan ekonomi global.

Demikian, terima kasih Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Bapak Ramson.

Luar biasa Bapak Ramson, pendukung Menko Perekonomian dari Gerindra.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Nanti saya kasih masukan sebagai teman.

Terima kasih Pak Ketua, saya kan sekarang ini sudah kompak ini, jadi kita dukung Bapak Jokowi, walaupun dulu waktu beliau Walikota teman juga.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Vera, siap-siap mungkin Ibu Ela.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya membaca bahwa disini BNI telah menyalurkan kredit terhadap KUR itu realisasinya cukup tinggi, tertinggi bahkan di beberapa bank nasional lainnya. BNI bahkan bisa mengalahkan dua digit dari BRI. Ini terus ditingkatkan Pak, memang kalau berbicara masalah KUR inikan program mandatory siapapun Pemerintahnya juga harus kita dukung yang pada saat itu kan program KUR di-*launching* pada tahun 2005. Dan ini masih tetap berjalan tentunya memang kalau berbicara masalah KUR dan UMKM, NPL-nya selalu tertinggi ya memang karena begitu. Jadi kalau bisa ada satu program untuk mereka bisa melakukan *right off* karena memang itu bagian dari dedikasi bank nasional terhadap dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Karena kita tahu pada krisis global, krisis 2008 KUR penyumbang terbesar pada saat itu, UMKM yang menyumbang terbesar pada saat itu. Jadi buffering ketika kita krisis fiskal ternyata pertumbuhan UMKM itu yang tertinggi pada saat itu yang memberikan sumbangan terbaik untuk Pemerintah. Jadi tolong ditingkatkan Pak, khususnya kita tahu di sector pertanian dan perdagangan ini masih didominasi oleh perdagangan, namun pertanian juga belum signifikan da juga perikanan. Karena memang di Dapil saya ini Karawang selain pertanian, perikanan juga cukup tinggi.

Terkait dengan para petani kita tahu Karawang itu surplus Pak, berasnya di 15 ribu ton. Jadi program Pemerintah di RPJP jangka panjang bahwa Karawang itu akan menjadi lumbung padi dunia 2045. Sehingga perlu dukungan dari semua kepentingan *stake holder* Pemerintah Maupun dari perbankan mendukung program tersebut. Kami berharap karena kami disini ada dua orang mewakili Kabupaten Karawang, Bekasi, tentunya penetrasi Bank BNI harus lebih ditingkatkan khususnya Dapil Jawa Barat VII kedepannya.

Berbicara mengenai asset BNI Kita tahulah 815 triliun luar biasa. Kita tahu kenapa bunga kredit terhadap BNI ini, bukan hanya BNI tadi pagi saya juga berbicara dengan Bank Mandiri mereka itu tidak bisa bersaing walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan diangka 5 yang paling menjadi tantangan tersendiri itu adalah pihak perbankan sulit untuk menurunkan di angka satu digit. Karena saya memahami mereka tidak bisa melakukan satu kompetitif, kenapa? Karena terlalu banyak pungutan-pungutan. Saya kalau berbicara masalah pungutan itu agak alergi. Pungutan yang sudah dilakukan oleh LPS ditambah lagi berdirinya OJK, itu mereka lakukan pungutan registrasi. Kebayang oleh saya 815 itu kalau 0,045% berapa OJK merauk pungutan tersebut. Jadi ini perlu bagaimana kita datang atau rapat dengan para perbankan selalu kita mengeluhkan kenapa bunganya kok tidak bisa diturunkan. Ya kita mereka harus mengambil margin disini, karena terlalu banyaknya pungutan tersebut. Belum lagi Bank Indonesia juga memberikan pungutan tentunya disini, tetapi tidak sedrastis apa yang dilakukan oleh OJK.

Pada tahun 2008 ketika OJK belum berdiri itu antara suku bunga Bank Indonesia diterapkan oleh perbankan itu bisa sampai angka 9 tidak jauh berbeda. Sekarang kan margin cukup besar disperitas margin mereka itu cukup tinggi, karena terlalu bagaimana bank bisa bersaing, bagaimana bisa memberikan keuntungan karena itu harus dipikirkan setiap bulan mereka punya beban. Bagaimana mereka harus bisa menghitung semua dan menjadi beban terhadap setiap resiko yang mereka harus pikirkan kedepannya.

Jadi memang kita akan melakukan revisi Undang-Undang OJK untuk menerapkan bagaimana system pungutan. Ada pungutan resgistrasi, denda, keterlambata dan saya melihat kemarin juga ada keterlambatan ada sanksi, di atas sanksi ada denda lagi. Jadi luar biasa, saya agak alergi kalau melihat bahwa terlalu banyak pungutan-pungutan yang di-*collect*. Memang mereka harus bisa melakukan mengoperasionalkan bisnisnya, maksudnya mengoperasionalkan jalannya satu lembaga tapi bukan dengan seperti itu skemanya. Kita akan pikirkan kalau bisa dikembalikan ke APBN, jadi bank-bank ini bisa tumbuh. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan kedepannya.

Dan yang saya ingin tanyakan BNI ini banyak memberikan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya proyek Pemerintah infrastruktur ini cukup besar. Dan saya ingin menanyakan apakah BNI menerapkan mana yang lebih nyaman *cross currency swap* atau *hedging*, karena kita tahu kalau *cross currency swap* itukan tenornya bisa lebih 5 tahun tetapi kalau *hedging* itukan sudah dipatok. Dan itu bisa menggunakan dua mata uang.

Nah, dalam memperkuat struktur pembiayaan jangka panjang tentunya terutama untuk proyek infrastruktur, inikan hanya bisa dipatok 5 tahun. Nah, kira-kira dengan peraturan PBI 2014 sudah dilahirkan mengenai system skema *cross currency swap*. Kita tahu banyak pembiayaan-pembiayaan dari Cina, jadi ketika pakai Yuan dan kembali Dolar tetapi kan BNI dulu masih memakai Rupiah. Tetapi ketika terjadi kenaikan suku bunga atau kurs ini mereka akan kesulitan. Jadi ingin saya tanyakan dengan system seperti ini mana yang dianggap lebih fleksible dan lebih nyaman untuk digunakan, karena kita harus mempertimbangkan resiko kedepannya.

Dan mengenai transaksi derivative BNI perlu melakukan mitigasi resiko yang tadi saya sampaikan. Menjaga kestabilan nilai tukar apakah BNI pernah memiliki atau pernah melakukan simulasi mengenai hal tersebut. Karena ini harus diantisipasi kedepannya gitu Pak, terkait dengan banyaknya proyek pembiayaan infrastruktur dan ketenaga listrikan yang memang menjadi dominasi bisnis BNI.

Dan yang ingin saya tanyakan lagi adalah mengenai program terkait dengan penerapan standar basel 3 2019 bahwa dimana perbankan harus memperbaiki pendanaannya. Namun, perbankan harus selektif dalam pendanaan agar tidak terganggu permodalan. Kita lihat pada saat ini permodalan lebih cenderung kepada tenor yang jangka panjang. Selain itu, tantangannya adalah net interest margin kita tahu bahwa Indonesia itu tertinggi. Tadi pagi juga saya tanyakan kepada Bank Mandiri, Indonesia yang paling tertinggi di negara Asean, dibandingkan Singapura yang 1,8% dan Philipina 3%. Namun, kalau di kita ini signifikan sekali angkanya. Yang perlu menjadi perhatian kalau semakin tingginya peningkatan terhadap system atau skema kedepannya bagaimana ketika hal tersebut tidak mengganggu terhadap bisnis ataupun permodalan ataupun NIM yang semakin besar yang perlu menjadi perhatian BNI kedepannya.

Dan yang terakhir, mengenai tantangan fee base income. Kita tahu banyak beberapa perbankan juga mengalami hal yang sama agar modal cukup dan tidak terkait dengan distrubsi dan efisiensi biaya, hal ini menjadi catatan BNI kedepannya Pak, agar kinerja keuangan persero ini menjadi kuat dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri kedepannya supaya kita tahu BNI menjadi salah satu anker bank dan juga agen development tadi disampaikan dan ini harus menjadi kebanggaan kita. Apalagi dengan penyaluran kredit yang paling tinggi cukup signifikan di bulan Agustus. Saya lihat laporannya tertinggi dan kalau bisa terus ditinggikan Pak, jangan mau kalah sama BRI. Harus lebih lagi, harus lebih agresif kita yakin bahwa BNI bisa melakukan penetrasi, karena luar biasa pada saat itu BNI pada tahun 2000 periode yang lalu 2009-2014 BNI ini tidak tahu mau kemana kornya, tidak jelas pada saat itu. Tetapi ketika saya kenal sekali Bapak Baiquni beliau adalah seorang bankers dari waktu itu masih consumer juga di koperasi. Saya sempat mengenal beliau sempat pindah ke BRI dan sekarang menduduki kursi BNI nomor satu. Jadi integritasnya Bapak Baiquni ini ketika duduk menjadi BNI itu banyak sekali yang kita lihat banyak perubahan yang positif. Nah, ini sehingga BNI itu dulu sempat kita pertanyakan BNI itu mau kemana bisnisnya sebelum Pak Baiquni duduk masih belum jelas, karena dengan Bank Mandiri ini 11-12. Bersaing

dengan Mandiri tidak tetapi midle pada akhirnya pada saat itu. Kita bicara pada periode yang lalu.

Nah, tentunya perlu ada satu bisnis yang diunggulkan disini sebagai penyaluran terhadap program Pemerintah, KUR Tani dan lain-lainnya juga dengan adanya smart city juga kita memberikan apresiasi, karena tidak ada bank yang melakukan penetrasi terhadap pengembangan atau linkage dengan program Pemerintah cuma BNI yang saya lihat, yang keseriusannya melakukan hal tersebut di smart city. Nah, ini terus dipertahankan dan terus dikembangkan Pak. Saya minta untuk kedepannya Kabupaten Bekasi juga harus ada, karena mereka tidak jauh dair Jakarta. Dan mereka sudah siap, di Cikarang itu sudah siap kalau kita lihat salah satu kecamatan akan tetapi sudah seperti kota tersendiri. Nah, mereka siap untuk diterapkan smart city kedepannya.

Dan yang menjadi kebanggaan kita terhadap Bank BNI ini, Bank BNI satu-satunya menjadi remiten untuk pembayaran pegawai di Eropa. Nah, ini tentunya kalau berbicara bank sebetulnya Bank BNI lebih dikenal dibandingkan Bank Mandiri. Bank Mandiri padahal sudah lebih awal, tapi BNI ketika dia buka kantor cabang di London yang tidak jauh hanya diseberang tempat Puteri Diana menikah itu luar biasa menjadi kebanggaan. Kita juga bangga menjadi orang Indonesia pada saat itu membuka kantor cabang karena yang begitu kita tahu yang kesulitannya seperti apa, namun BNI tetap bisa eksis.

Inikan ada rencana bahwa kedepannya itukan kita menerapkan basel 3 untuk kedepannya. Nah, mengenai Asean Financial Agreement mengenai pembahasan. Dan pembahasan mengenai retifikasi ini sedang dibahas di Pemerintah. Ketika itu sudah siap apakah BNI siap untuk mengembangkan sayapnya membuka kantor cabang di Asean. Jangan seperti kayak Mandiri sudah buka di London akan tetapi maju mundur mau tutup pada saat itu tahun 2010. Saya berjuang sekali jangan sampai tertutup, Bapak Agus Marto pada saat itu juga tidak tahu dan saya minta dukungan politik pada Bapak Darmin untuk dipertahankan Bank Mandiri di London, karena itu menjadi kebanggaan kita sebagai mitra Komisi XI DPR RI pada saat itu.

Nah, ketika BNI sudah membuka kantor cabang dengana danya retifikasi yang sudah disusun Pemerintah Asean Financial Agreement karena kan kita tahu bahwa bank-bank asing itu sangat mudah membuka kantor cabang di Indonesia, tetapi ketika bank kita buka cabang itu ijinnya 3 tahun bahkan sampai bertahun-tahun, mau minta pegawai satu saja nunggu ijinnya luar biasa. Tapi ketika retifikasi ini sudah diterapkan tentunya perjanjian ini akan lebih mudah. Yang saya harapkan BNI bisa membuak kantor cabang di Timur Tengah belum ada, karena jangkauannya kan terlalu jauh kalau harus ke London. Kalau Asia bisa melalui Tokyo atau Singapura, kalau di Timur Tengah agak sedikit jauh. Karena kira tahu sekarang mengarah ke Timur Tengah banyak proyek infrastruktur yang memang pembiayaannya Timur Tengah sudah melirik kita. Jadi harus menjadi proyeksi program atau proyeksi kedepannya 2020 ataupun 5 tahun kedepan seperti itu.

Dan saya berharap BNI tetap harus lebih baik lagi jangan mau kalah sama BRI karena BRI sekarang sudah ketinggalan ini gasnya. Saya tidak mengatakan BRI itu tidak baik, tetapi memang kenyataannya NPL-nya juga tinggi luar biasa saya lihat

ini 2,9 saya membaca, tetapi BNI hanya 1,8 dan proyeksi tahun depan 2020 bisa 2 NPL-nya yang tertinggi memang karena KUR dan UMKM. Kita tahulah siapa pun bank pasti tidak ada yang mau nengok UMKM dan KUR, karena luar biasa mereka harus kerja extra. Namun, dipertahankan tetap kalau bisa jangan sampai di angka 2 digit untuk NPL-nya.

Itu saja dari saya menjadi perhatian untuk Bapak Baiquni, tolong untuk kabupaten Jabar VII diperhatikan juga. Kalau bisa *door to door* Petani tadi Bapak Heru juga bilang bagaimana mereka bisa pergi ke bank karena itu adanya di kota. Bapak Baiquni pernah ke Karawang tahu kalau itu Cuma di kota, tapi kalau kita sampai ke Pakis tempatnya Lion Air jatuh itu bisa 3 jam dari situ Pak. Bagaimana mereka para nelayan harus pergi ke kota untuk menjemput bola mendapatkan bantuan tersebut. Jadi mereka harus melalui Gapoktan ketuanya Gapoktan, sehingga itu menjadi kesulitan akses mereka.

Jadi sebaiknya ketika para bankers atau para perbankan nasional turun membantu program Pemerintah menjadi madatorinya turunlah gayanya seperti para petani, jadi *door to door*. Kalau bisa turun becek-becek turun ke sawah, saya saja turun ke sawah. Jadi itu harus dilakukan dan juga ke pasar juga harus Pak, karena di pasar itu mereka adalah orang-orang yang *honest* walaupun NPL-nya tinggi akan tetapi mereka orang-orang yang sangat jujur. Terutama kalau pertanian itu NPL-nya tinggi karena itu memang cuaca ketika musim paceklik mereka sulit untuk mengembalikan. Jadi memang tinggi Pak, tapi kita harus memikirkan ketika NPL tinggi terhadap pihak petani ada program yang bisa di *right off* atau bagaimana skemannya, karena kasihan mereka itu harus berpikir ketika mereka setiap 6 bulan sekali mengembalikan. Dan kalau bisa 0% bunganya, atau dibikin misalnya seperti apa yang terbaik. Indonesia ini sangat luas terutama di bidang pertanian dan itu harus terus ditingkatkan kesejahteraannya dan kalau bisa petani juga walaupun dari Pemerintah sudah ada asuransi tani itu juga program di setiap kabupaten berbeda-beda akan tapi BNI bisa mempunyai program asuransi untuk para nelayan. Ketika mereka tangkap di laut mereka pergi itukan kadang-kadang suka mati, tanganya putus kena segala macam. Jadi itu tolong diperhatikan Pak, perlu ada program asuransi para nelayan dan asuransi para petani untuk mereka mempertahankan harga gabahnya.

Saya kira itu salah satu program CSR mungkin atau apa yang bisa dikemas agar para petani kita di skala yang paling kecil itu mereka bisa mendapatkan bantuan yang luar biasa. Dan saya berterima kasih pada saat itu Gapoktan juga mengatakan BNI memang ada yang masih suka minta nanya SIM-nya menjadi jaminan. Saya berusaha menghubungi salah satu kantor perwakilan disana ternyata jangan lagi ditanyakan jaminan-jaminan sepeda motor dan segala macam kasihan mereka hanya minjam uan 5 juta tetapi luar biasa mereka harus mengorbankan asetnya seperti itu dan tanggungjawab mereka luar biasa, karena mereka itu takut kalau sudah didatangi sama bank kayak ketakutan, padahal uangnya juga kecil yang mereka pinjamkan.

Jadi terima kasih dari saya dan tolong Pak Baiquni ditingkatkan *smart city*-nya untuk menjadi proyeksi *development* di beberapa kabupaten seluruh kabupaten

terutama pada teman-teman kita yang ada disini di Dapil untuk coba dilihat lagi peluang untuk mengembangkan *smart city*.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Ela dan siap-siap Bapak Andreas.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Terima kasih Pimpinan.
Seijin Pimpinan.

Bapak Baiquni beserta direksi yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatannya, saya akan lebih mungkin bisa dijelaskan tadi bukan hanya terkait laba. Biar lebih mudah dipahami mungkin dijelaskan juga terkait total asset beserta total kredit di 2019. Itu yang pertama, biar bisa memudahkan membandingkan dengan bank lain, kayak tadi Mandiri dan juga bank-bank lain yang menyusul.

Yang kedua, BNI ini dibandingkan dengan bank lain mendapat tugas dalam rangka kesinambungan program Pemerintah, penyaluran Bansos dengan PIP dan juga kartu tani dan lain sebagainya. Apakah ada model kerja sama dengan lembaga keuangan lain dalam rangka penyaluran tersebut. Karena dilihat meskipun BNI bank Pemerintah tetapi keterwakilan di daerah masih sangat minim. Sementara penerima-penerima yang dari bantuan sosial lainnya, bantuan sosial yang dari Pemerintah itu kebanyakan menengah kebawah. Kira-kira model kerja sama terus apa saja kira-kira kalau ada. Apa langsung menyalurkan sendiri dan lain sebagainya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, masukan untuk 2020 meskipun focus 2020 ini di model bisnis digital dan ekosistem akan tetapi juga penting senantiasa menjaga keseimbangan melalui kerja nyata untuk pendampingan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Meskipun tadi KUR-ya serapannya lebih banyak tetapi tetap untuk 2020 juga ditingkatkan. Terus apa ada kriteria untuk smart city karena memang Lampung belum ada satu kabupaten yang layak untuk mendapat program tersebut. Kira-kira kriteria-kriteria yang memang mendukung terhadap proram smart city karena itu yang mungkin bisa dirasakan ...

... (KASET 3 REKAMAN RUSAK) ...

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PKB (Drs. FATHAN):

Tidak bagus gitu loh, beban pembiayaan besar dibanding asetnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana sesungguhnya kajian-kajiannya apakah memang ada mandatory khusus yang dibebankan BNI sehingga untuk infrastruktur BNI agak kelihatan sekali obral untuk kreditnya. Apalagi ketentuan sekarang ekonomi lagi tidak bagus, bagaimana mitigasi-mitigasi resikonya kedepan.

Yang kedua, saya apresiasi BNI terobosan-terobosannya tentang virtual banking ini yang di Singapura sudah mulai tumbun virtual banking yang saya dengar di KCP Dukuh Atas itu orang buku rekening dengan satu e-KTP langsung dapat konfirmasi dari Dukcapil langsung bisa apply, langsung 5 menit jadi. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini juga simetris dengan gerakan Pemerintah untuk single identity number.

Nah, saya melihat bahwa ini perlu juga dikembangkan ke beberapa cabang-cabang lain sehingga memang ada beberapa kerugian misalnya akan mengurangi SDM, akan mengurangi tenaga kerja. Tapi ke depan saya kira memang eranya virtual banking karena bisa mengurangi cost juga, officenya juga. Dunia banking sampai hari ini masih dikesannya Gedung yang mewah, staf yang banyak dan tempat yang rapih. Kalau virtual banking ini bisa kita kembangkan saya kira penghematan akan luar biasa sekali. Dan itu implikasinya juga untuk penurunan bunga, juga untuk efisien cost yang bisa kita tekan.

Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Demikianlah tadi Bapak Dirut pendalaman dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan tanggapan, kalau meminta tertutup atau terbuka Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Jadi ada yang kami bisa langsung kami jawab akan kami jawab, tetapi nanti kalau yang sifatnya diperkenankan kami menjawab tertulis.

KETUA RAPAT:

Yang lain tertulis tapi kalau bisa yang lain dijawab secara lisan, dalam menjawab perlu terbuka atau tertutup, kalau tertutup tinggal kita tutup saja.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kami terbuka tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Yang pertama, ini kaitannya dengan pertanyaan Bapak Rudi Hartono mengenai belum nampaknya data laba bersih di dalam slide kami sepertinya sudah ada Pak, itu di halaman 11 itu Pak. Itu yang kami sebut *earning after tax*, untuk Q3 2019 itu 11,973.

Kemudian dari data 11,9 laba inikan ada potongan sekitar 2,5% untuk kemitraan dan bina lingkungan. Jadi totalnya kalau dari situ kurang lebih sekitar 213 miliar dana itu, terdiri dari kemitraan 82 dan bina lingkungan 131 totalnya menjadi 213 miliar.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.M.):

Ijin Pimpinan, tapi tidak dicantumkan secara detail.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Nanti bisa kami lengkapi Pak.

Kemudian yang terkait tadi apakah ada bagian daripada DPK kita yang ditempatkan di dalam instrument-instrumen selain pinjaman. Tadi Bapak Ramson juga menanyakan masalah itu. jadi sebenarnya dari DPK yang kita kumpulkan itu memang ada kewajiban yang kita sebut sebagai *primary reserve*, yaitu dalam bentuk uang tunai, itu yang sekarang sekitar 6% itu wajib. Di samping yang 6% tadi ada *secondary reserve* ini dalam bentuk surat-surat berharga, seperti obligasi, SUN, ini yang kami sampaikan.

Tapi di dalam kami melakukan investasi sebenarnya kami ada kebijakannya. Kebijakan yang kami lakukan yang pasti harus surat berharganya itu tergolong dari investment grade dan Pemerintah sama swasta kita bedakan. Ini jadi kita punya kebijakan-kebijakan yang bisa dilewati. Jadi kalau tadi dikhawatirkan saham-saham yang mungkin kurang likuid itu rasanya kami hindari, tidak sesuai dengan kriteria.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Bapak Ketua.

Kebetulan saya tidak mempersoalkan soal saham-saham yang tidak likuid, saya hanya menyampaikan bahwa BNI memberikan utang kepada Pemerintah melalui obligasi Pemerintah sekitar 88 triliun. Jadi itu mungkin teman yang lain yang mempertanyakan.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.M.):

Saya mungkin Pak, dibelikan kemana saham investasinya.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Jadi dari DPK yang kita kumpulkan yang pasti kita tahan 6% untuk primary deserve. Kemudian secondary reserve, ini kita bentuknya adalah seperti tadi surat berharga, obligasi Pemerintah. Artinya, setiap saat kita perlukan kita masih bisa dalam waktu singkat untuk mencairkan. Kemudian juga ada treasury reserve ada lagi, sampai terakhir akhirnya kepada kreditnya itu sendiri.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.M.):

Ijin Pimpinan, saham-saham yang berbentuk seperti yang bukan saham terkenal itu ada dibeliin Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tidak, itu tidak masuk dalam kriteria kita. Jadi kalau kriteria kita sama-sama yang blue chip yang seperti itu dan kita sedikit sekali di saham, hampir tidak ada kalau saham. Kita lebih banyak di surat-surat berharga seperti obligasi Pemerintah.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Bapak Ketua.

Tadi yang saya pertanyakan mengenai pra NPL, karena kalau ratio antara total DPK dan total kredit saya tidak mempersoalkan, karena saya tahu tadi saya baca struktur ikhtisar keuangan BNI cukup kuat untuk itu. Artinya, biar pun itu sudah rasionya cukup tinggi tetapi di-back up aset-aset yang lain yang masih likuid.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Primary reserve dan secondary reserve ya, ini justru mungkin tolong disampaikan saja secara tertulis karena mungkin. Apajagh primary reserve ini misalkan kompisinya bisa dikurangi dalam bentuk tunainya. Karena kan tujuannya sama ini, kalau misalnya tadi investment grade atau katakanlah surat utangnya negara itukan sebetulnya juga akan memberikan kelonggaran. Hal-hal yang kayak gitu sebetulnya tolong nanti disampaikan.

Terima kasih.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Baik Pak Andreas.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Bapak Harry Poernomo yang terkait dengan adanya program pendirian Balkondes di sekitar Borobudur ada kurang lebih sekitar 22 desa. Memang idenya itu pada waktu itu supaya keberadaan Borobudur tidak hanya memberikan keuntungan bagi yang sekitar Borobudurnya, yang persis di lokasi Candi itu. Desa-desa yang akan terpencil ini kita coba menangkap peluang itu dengan cara mendirikan Balkondes kerja sama dengan Bungdes.

Memang dalam perjalanannya ini antara satu Balkondes dengan Balkondes yang lain berbeda. Nah, kami mungkin bisa dapat hanya cerita untuk yang kami sendiri. Bahwa Balkondes yang kami bangun di samping Balkondes kami juga membangun adanya home stay. Dan dari hasil keuangan yang dikelola oleh Bungdes sendiri itu hasilnya surplus. Artinya, untuk menghidupi diri sendiri sudah mampu dan manfaatnya juga untuk masyarakat sekitarnya. Artinya, dana itu kami iijinkan untuk sebagian digunakan untuk keperluan daripada masyarakat itu, jadi melalui Bungdes tadi.

Bisnisnya itu kalau sekarang berkembang itu di Balkondes kami di samping home stay, yaitu tempat Balkondes sering diadakan untuk wedding party, kemudian untuk meeting atau acara sosialisasi banyak sekali dilakukan. Dan rasanya untuk booking sudah cukup padat dalam setiap minggu. Jadi saya rasa ini pengelolaan yang sangat positif.

Memang yang Bapak katakan tadi ini bagaimana memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Yang kami sampaikan begini, seandainya ada wedding party kai minta kepada pengelola Balkondes, misalkan si penyewa tadi itu artinya tidak 100% diijinkan membawa makanan dari luar, pesan dari catering yang lain. Nah, kami minta misalkan kalau memang disitu unggul kopinya, ya kopinya jangan ambil dari tempat lain. Kemudian ada makanan yang lain itu kami minta paling tidak sekian persen harus disupply oleh penduduk sekitar supaya bisa memberikan manfaatnya.

Tapi sebenarnya yang menarik kalau mengenai home stay ini yang kami bangun di Sembalun itu. Jadi di Sembalun itu di Nusa Tenggara Barat, itu memang terkenal dulunya petani bawang terus kemudian pada waktu itu terjadi namanya penurunan daripada petani bawang kemudian kami coba mengaktifkan dalam 4 tahun terakhir ini. Dan *alhamdulillah*, petani mulai bangkit kembali yang ada di Sembalun.

Nah, di samping itu juga kami membangun yang namanya home stay. Jadi ada penduduk-penduduk yang pekerjaannya sebagai porter untuk naik ke Gunung Rinjani, mereka sudah memiliki rumah itu dalam perkampungan-perkampungan kami berikan itu, Misalkan satu rumah ada yang 20 juta, ada 50 juta, tujuannya untuk apa? mrerenovasi misalkan kamar, menambah kamar mandi dan sebagainya supaya memang turis bisa berdiam di situ. Dan itu langsung dinikmati oleh pemilik daripada rumah itu. Ini yang akan kami kembangkan kedepannya pola-pola yang ada di Sembalun ini.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

Menarik sekali Bapak Baiquni, tolong di Karawang itukan kita terkenal ada wisata religi Saikuro, di mana penyebaran Islam pertama masuknya disitu. Nah, kalau bisa itu juga dibuatkan karena memang infrastruktur maupun wisata religi itu belum tersentuh oleh BUMN saya lihat. Sampai lapaknya masih sangat-sangat memprihatinkan. Apabila BNI bisa memberikan kontribusi itu terhadap wisata religi itu sama seperti Cirebon, tapi sebetulnya Karawang ini mempunyai potensi luar biasa mengenai penyebaran Agama Islam pertama kali masuknya di Saikuro. Nah, ini tolong diperhatikan memang itu di Cilamaya jauh sekali tempatnya tetapi tidak terlalu jauh dari kota. Dan itu tempat makamnya Saikuro yang harus dilakukan pemugaran sehingga homestay-nya juga tidak terjemah bahkan orang juga harus pulang pergi. Bapak Baiquni kan pernah ke Karawang, bagaimana jauh aksesnya antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain itu luar biasa. Nah, itu dekat daerah pantai.

Kalau bisa ini juga wisata religi yang ada di Cirebon dan beberapa di Jawa Barat itukan luas sekali, itu bisa dikembangkan. Karena saya juga melihat yang di Sembalun juga bagus sekali, saya juga lihat waduh ini keren banget ini tempatnya agak klasik stylenya dan itu kita lihat bagaimana kenapa ini bisa seperti ini bagus sekali pengembangan rule model ini bukan hanya di satu daerah tetapi seluruh penetrasinya terutama Indonesia itu luas sekali, jadi ada unggulan. Nah, ketika Sembalun ini BNI masuk semua orang jadi melihat bank-bank lain juga mentriger menjadi salah satu rule model yang mereka menginginkan hal yang sama, menjadi pihak pioneer.

Nah, saya lihat untuk Saikuro itu Pak, tolong kalau Bapak masuk kesitu itu setiap hari wisata orang datang kesana untuk segala macam. Kita itu memang menjadi budaya seperti Cirebon itu juga luar biasanya potensinya karena ratusan orang setiap hari bahkan yang dari Jawa Timur turun kesitu juga. Saya kira itu harus menjadi perhatian khusus.

Terima kasih, sama-sama nanti kita Ibu Puteri ya.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Terima kasih Ibu, menjadi catatan kami.

Memang daerah yang belum jangkau itu masih sangat luas, sebenarnya kami mencoba dengan model pilot ini kalau memang ini sukses model ini yang akan kami kembangkan di setiap wilayah untuk mereka mencari daerah-daerah yang potensi untuk kita bantu.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami lanjutkan yang terkait tadi mungkin yang menarik dengan kredit kepada sektor infrastruktur itu apakah ada semacam tekanan atau kewajiban bagi BNI.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Ketua.

Tadi Bapak Dirut, tolong dijelaskan maksudnya pra non performing loan, karena antara non performing loan dengan pra NPL itu cukup tinggi perbedaannya, rasionya.

Terima kasih.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Oke, mungkin bisa ditayangkan tadi yang mengenai NPL-nya tadi yang 0,9 tadi, karena ada pra NPL-nya juga. Disini ditayangkan mengenai KUR, NPL-nya 0,9% sementara pra NPL 3,4%. Yang kami maksud dengan non NPL itu adalah kredit golongan 3, 4 dan 5 Pak, sementara kalau pra NPL ini kredit golongan 2 Pak. Jadi di dalam pra NPL ini misalnya ada terlambat bayar bunga satu hari pun sudah masuk di dalam pra NPL, jadi kami punya catatannya itu. Keterlambatannya itu mulai dari satu hari sampai sekian hari yang dikelompok itu. Jadi kami rasa semua juga ada seperti ini, mungkin yang tadi oleh Bank sebelum kami dijelaskan hanya NPL-nya tetapi sebenarnya semua bank pasti memiliki pra NPL-nya ini. Tapi untuk KUR kami tampilkan pra NPL ini.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, sebetulnya kalau kita bicara KUR sebetulnya juga yang lainnay ada, itu yang pertama. Yang kedua, juga ininya sebetulnya tenornya karena antara yang baru itu berapa banyak sama kemudian yang recycling atau yang bertumbuh. Dan sebetulnya yang kita inginkan sebenarnya KUR ini juga *measurement*-nya adalah berapa banyak yang naik kelas. Itu berapa persen, karena itu penting. Karena misalkan kalau dia cuma muter disitu tetapi kelasnya di bawah terus berarti pengembangan bisnisnya masih patut dipertanyakan.

Terima kasih.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ijin Pimpinan, Bapak Baiquni, dipastikan bahwa BNI prinsip KUR-nya adalah benar-benar visibility bukan bankability-nya. Karena ada kan bank yang karena ingin penyerapan KUR-nya tercapai maksimum tetapi dia memberikan kredit tersebut kepada existing debitur, sementara kita tahu prinsip KUR adalah mereka benar-benar yang non bankability tetapi dia visible usahanya.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Yang kami salurkan seperti itu Ibu, jadi benar-benar debitur baru, tetapi juga ada yang naik kelas. Jadi kami punya skema product kita sendiri.

DIREKTUR BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN JARINGAN PT. BANK BNI (TAMBOK P. SETYAWATI):

Ibu menambahkan, tadi kalau KUR naik kelas dari yang KUR menjadi komersil itu dari Oktober lalu sampai sekarang ada 170 ribu debitur dengan nominal sekitar, ini jumlah debiturnya tahun lalu 170 ribu yang naik kelas dan tahun ini 234 ribu debitur. Tetapi di dalam KUR-nya sendiri kan ada klasifikasinya, ada KUR mikro naik ke KUR yang kecil. Nah, di KUR mikronya itu juga ada yang naik kelas dari KUR mikro menjadi KUR kecil ada 1.921 orang nominalnya 253 miliar.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Terkait dengan pertanyaan Bapak Hatari mengapa jumlah debitur KUR BNI ini sangat sedikit dibandingkan dengan Mandiri. Karena begini, kami ini tidak punya unit layanan mikro sebenarnya, kalau Mandiri punya dan BNI juga punya. Nah, kalau toh mikro kami ada KUR mikronya sifatnya yang kolektif, kluster-kluster seperti itu. Jadi kalau yang individual kami memang tidak memiliki unit itu. Oleh karenanya memang target yang diberikan kepada kami mengenai KUR untuk KUR mikro itu kecil dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Itu kondisinya yang membuat kami berbeda.

Kemudian ini pertanyaan dari ...(suara tidak jelas)

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak, tadi suku bunga riilnya belum dijawab Pak Dirut. Saya pikir itu tidak perlu rapat tertutup untuk penjelasan itu saja.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Bagaimana Pak, kalau kami mohon untuk bisa jawab secara tertulis data-datanya supaya lebih rinci lagi mengenai suku-suku bunga tadi per jenis kredit.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oh, itu mau tertulis jawabanya.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Iya, kalau memang diijinkan Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau memang permintaan begitu oke saja, tapi yang faktanya gitu. Jadi supaya memberikan literasi yang baik bagi publik dan bagi nasabah. Karena kadang-kadang dibilang 10% flat katanya, tapi sesudah dihitung-hitung riilnya 18%.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kalau mengenai itu Pak, sebenarnya yang khusus yang flat ini kami hanya memberikan untuk kredit konsumtif. Sementara kalau untuk kredit yang produktif semuanya itu efektif.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kredit produktif misalnya beli mesin angsuran itu tidak pakai sistem flat.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tidak, kalau kredit produktif kami sistemnya sistem efektif Pak, yang konsumtif memang iya itu sifatnya flat tadi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tapi realnya kan jadi tinggi kalau dihitung secara admitted.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tidak sih Pak, kalau consumer iya Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau 10% flat realnya jadi 18%.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kalau consumer iya, lebih tinggi biasanya sekitar 2%-3% di atas bunga yang berlaku.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau dihitung 10% jadi 18% itu.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tidak sampai Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Lebih.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kita punya kredit payroll dengan jaminannya itu adalah gaji, itu flatnya 10% sekitar efektifnya jadi 13,5%.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Nanti dijawab tertulis saja sama hitungannya. Artinya untuk Komisi XI DPR RI saja, karena itukan juga perlu dari sisi peningkatan demand untuk pertumbuhan ekonomi.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Terus terkait tadi pertanyaan apakah ada mandatory dari kami untuk membiayai infrastruktur. Sebenarnya sama sekali tidak ada Pak, inikan kalau kita lihat dari total kredit yang kita salurkan sebesar 500 triliun itu kurang lebih untuk sektor infrastruktur 108 triliun setara 21%. Nah, ini kalau kita lihat 21% cukup besar infrastruktur. Tapi infrastruktur inikan terbagi-bagi, ada jalan tol, kemudian tenaga listrik, transportasi, telekomunikasi, migas. Jadi kalau kita bagi-bagi yang paling tinggi memang jalan tol. Nah, jalan tol sendiri sebenarnya kami banyak untuk yang daerah Jawa, karena memang lalu lintas hariannya itu sudah cukup tinggi. Sehingga kami meyakini apalagi kalau kita lihat 4 tahun terakhir, sepertinya kalau kita bicara sektor kredit yang mana yang paling prospek sebetulnya infrastruktur Pak. Karena kalau yang lain berbicara property juga lagi.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.M.):

Interupsi Pimpinan.

Tapi begini Pak Dirut, kalau jalan tol Jawa oke, Jakarta dan Jawa itu banyak kendaraan per menit, per detik, tapi wilayah Sumatera memang itu merugi Pak Dirut. Jadi tidak semua Pak Dirut itu.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kalau yang diluar Jawa itu kami sedikit sekali, tapi ini juga ikut yang program dengan tambahan dari Pemerintah tadi PGF. Jadi misalkan ada ruas 50 KM, yang

komersial visiblenya itu cuma 25, yang 25 ini melalui BBN tadi Pak, sehingga menjadi visible. Ini yang kami pilih seperti itu Pak, jadi memang kami ada kriteria-kriteria untuk membiayai infrastruktur.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.M.):

Kalau tidak ada tidak apa-apa Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Ada sebenarnya, adakan yang IRR-nya 13%, oh tidak ada ya. Oke, nanti kami lengkapi Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, mohon ijin interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Harry.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Kembali atau kita masih bicara infrastruktur, saya tadi menanyakan proporsi migas ini, kecil sekali ini sebetulnya apa ya. Apakah memang ini jbukan fokusnya BNI atau mungkin ada alasan yang lain mungkin bisa dielaborasi.

Terima kasih.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kami sampaikan begini Pak, jadi era 2011 sampai dengan 2-14 sebenarnya pembiayaan kami ke infrastruktur migas ini cukup tinggi. Tapi kok ya pas saat itu terus kemudian harga minyak drop sehingga banyak debitur kami yang bermasalah, khususnya kaitannya dengan pembiayaan infrastruktur untuk sektor migas. Sehingga kedepannya kami lebih hati-hati juga itu, karena memang di samping kami belum terlalu berpengalaman di bidang migas itu karena memang kalau kita lihat ini, kalau kita bicara mengenai eksplorasi itu kan risikonya sangat tinggi, kecuali kalau eksploitasi. Nah, seharusnya kita fokus kepada infrastruktur yang kaitan dengan eksploitasi tadi Pak. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman ini Pak, kami tetap akan masuk tetapi memang kami sangat hati-hati.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Seijin Pimpinan, saya juga ingin diperjelas sektor migas inikan tidak hanya sektor hulunya saja tapi di hilirnya kita paham kegiatannya cukup, bahkan sekarang ini Pemerintah sendiri mengatakan kita neraca perdagangan kira defisit karena migas dan itu bukan disektor hulu malah di sektor hilir. Jadi kita bisa menyimpulkan betapa besar kegiatan hilir di sektor migas. Tetapi dari sisi penyaluran kredit ini kok kecil sekali, sebetulnya ada apa saya hanya. Atau mungkin *market share*-nya diambil oleh bank lain atau artinya BNI memang tidak fokus kesana. Ini yang ingin saya tahu, kebetulan kita mengangkat isu minyak dan gas, sementara bank lain tadi tidak muncul, jadi saya tidak *curious* dan penasaran ada apa.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Ijin, untuk saat ini memang kami tidak fokus kesana, karena pengalaman kami yang sebelumnya itu sehingga kami perlu lebih hati-hati. Dan juga inikan sebenarnya kalau kita bicara migas inikan paling banyak pembiayaan kita kepada Pertamina Pak. permasalahannya kan disini turunnya drastis, karena apa? Pertamina mendapatkan sumber pembiayaan yang bunganya lebih murah dibandingkan dengan bunga kami.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Jelas kalau begitu, terima kasih.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Bapak Ketua.

Tadi Bapak Dirut, rupanya inikan NPL sama pra NPL yang ada datanya khususnya penyaluran KUR. Secara umum tidak ada ya disini datanya? Pintar juga ya, jadi yang ditonjolkan KUR-nya. Jadi secara umum tidak kelihatan dia, Bank Mandiri kelihatan.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Maksudnya kenapa kami tayangkan yang KUR ini, artinya dibenak kita inikan sepertinya KUR ini mengandung resiko yang cukup tinggi. Tapi walaupun resikonya cukup tinggi tapi kalau kita lihat pra NPL-nya juga tidak terlalu tinggi. Itu kenapa kami tampilkan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Balik yang ke tadi, yang infrastruktur tadi. Ini memang perlu pendalaman tersendiri ini yang infrastruktur tadi. Karena kalau dilihat inikan pasti nanti karena misalnya konstruksi ya, itu berapa besar yang diberikan kepada BUMN, karena kita tahu ratio pada perusahaan-perusahaan itu kan dalam tanda kutip mengkhawatirkan. Terus apa yang mesti dilakukan untuk ini, ini sangat penting karena kita tahu bahwa kalau sebagian besar kepada BUMN konstruksi kita kan tahu kondisinya lagi menjadi sorotan. Jadi ini memang sangat penting untuk kita lebih perdalam lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan dilanjutkan apa sudah selesai Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Ingin menyambung sedikit Pak, mengenai tadi pembiayaan infrastruktur. Jadi memang begini Pak, kalau kita lihat dalam arti kata sebelum kita membiayai kita punya kriteria-kriteria. Nah, dalam perjalanannya ini proyek inikan hampir selesai semua Pak. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini kalau terjadi di cash flow, tapi dalam segi proyeknya sendiri sudah mulai menghasilkan. Sekarang bagaimana jalan keluarnya? Nah, Karya sendiri kan juga mereka mulai mencari sumber pembiayaan yang lainnya, penerbitan obligasi, menjual sebagian daripada kepemilikannya, antara lain yang saya lihat seperti itu. Cuma kalau kita lihat yang kita tidak terlalu khawatir karena sebagian yang kita biayai tolnya ini antara proyeksi lalu lintas harian dengan realisasinya itu sudah ...(suara tidak jelas) Jadi sesuai dengan asumsinya, hanya memang ... di cash flow iya.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Karena cash flow sebenarnya jantung, ini yang perlu kita nanti kita perlu bicarakan.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Bapak Ketua.

Apakah ada tekanan memberikan kredit untuk pembangunan jalan tol, tidak usah dijawab sekarang. Kalau FGD seperti Bapak Andreas katakan saja nanti.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Sepertinya tadi sudah kami jawab, sebetulnya tidak ada, kami sendiri yang memilih itu Pak. Karena begini, kami dibebaskan untuk memilih jalan tol mana saja. Kalau dikatakan kenapa kok kita royal, memang target kami untuk pekerjaan seperti ini kami menjadi *lead*-nya, ini sudah menjadi target kami.

KETUA RAPAT:

Baik, ada lagi?

Sudah cukup Pak, Bapak sudah selesai.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tadi yang terkait dengan digital sebenarnya kami memiliki bisnis modelnya atau mungkin secara ringkas Bapak mau menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Terkait strategi menghadapi digitalisasi ini Pak, BNI melakukan proses digitalisasi dengan 2 konsep. Pertama adalah konsep ekosistem *collaboration*, yang kedua kita menggunakan konsep *open banking*. Pengertian konsep ekosistem *collaboration* ini Pak, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, baik startup, fintech, e-commerce, maupun institusi sehingga menghasilkan *be to be*. Saat ini *be to be* kita antara BNI dan ...(suara tidak jelas) sudah sekitar 150 perusahaan yang tergabung dengan BNI. Kita menggunakan konsep *artificial programming interface*. Jadi *be to be* ini mereka pasti punya costumernya. Sebagai contoh BNI punya ...(suara tidak jelas) kurang lebih 40 juta sedangkan 150 perusahaan ini punya customer base juga Pak. Nah, ini *be to be* yang akan kita jadikan ekosistem *collaboration* Pak. Jadi nanti pemenang digital ini adalah terbesar ekosistemnya Pak. Semakin besar semakin luas ekosistemnya dialah yang akan menjadi pemenang.

Yang kedua adalah konsep digital kita menggunakan konsep *open banking*. Jadi kedepan BNI ini bertindak sebagai ...(suara tidak jelas) Digunakan oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh Go Pay, Go Pay itu kalau bayar PLN sebetulnya ...(suara tidak jelas) BNI Pak. Jadi kedepan kita akan menggunakan konsep *open banking* untuk memperluas ekosistem *collaboration* ini Pak. Jadi konsep kami, ekosistem *collaboration* dan *open banking* terkait dengan digitalisasi Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, ini juga perlu pendalaman, karena begini konsepnya adalah collaboration maupun open banking, kalau kolaborasi itu yang ...(suara tidak jelas) dan itu kita akan dimakan Pak. Contohnya sekarang banyak bank-bank akhirnya sudah harus kerja sama dengan ...(suara tidak jelas) dan segala macam. Nah, kolaborasi akan tetapi point saya adalah strategi nasional kita bagaimana, karena kalau itu nanti mereka yang akan masuk kepada kita Pak. Jadi sebetulnya ini yang perlu strategi perbankan secara keseluruhan ya, termasuk ini. Karena saya lihat sekarang semua bahkan bank-bank swasta yang besar pun sudah jadi katakanlah kolaborasi dengan yang dari Cina itu. We Chat dan segala macam itu saya lihat ini kerja sama kesitu. Justru kolaborasi itu saya lihat mereka itu capture di data. Jadi kita ini sebetulnya nantinya hanya menjadi value editnya tetapi value creaternya mereka. Ini yang sebetulnya kita mau kearah ekonomi digital itu betul-betul kita perlu waspada, karena saya beberapa kali ketemu dengan yang masuk ke Indonesia itu mereka tujuannya apa, kan sebetulnya yang akan menjadi tambah emasnya itu data Pak. Kalau mereka sudah pahami profiling nasabahnya berdasarkan mereka beli apa dan segala macam di payment system mereka, selesai sudah Pak.

Dan ini saya kira perlu isu strategis nasional sekali, karena semuanya sekarang sudah kolaborasinya dengan akhirnya yang besar Pak. Kita tahu sekarang saja kita tahu kalau mau transaksi apa saja, pakainya pakai yang besar itu. Jadi ini menurut saya sangat penting dan mumpung kalau mau katakanlah BUMN ini, bank-bank ini mau katakanlah melakukan holding dan segala macam menurut saya justru ini yang harus langsung segera dimasukkan dulu yang mengarah kedepan ini, sehingga saling bisa bersinergi.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya melanjutkan Pak Andreas, sebelum dikembalikan.

Saya sederhana tadi sama pertanyaan dengan Mandiri, inikan kita lagi bicara tentang penyaluran kredit BNI per sektor. Saya mengingatkan lagi bahwa tren resesi dunia ini berpengaruh terhadap ekonomi domestik Pak. Saya bukan mau pendalaman atau apa tertulis saja Bapak Baiquni. Apa langkah-langkah BNI yang lebih konkrit dalam menghadapi itu, misalnya tadi Mandiri dia sudah prediksi harga Dolar 34 sampai 35 ribu dan dia siap Mandirinya. Nah, ada beberapa lain yang dijabarkan secara teknis dengan aset dan omset hampir 1.200 triliun. Nah, inikan BNI ada sekitar 750 triliun saya dengar omsetnya.

Nah, artinya dalam rangka jangan sampai peristiwa 1998 terjadi Pak, habis semua kita digulung. Sampe Mandiri berasumsi bahwa Dolar itu akan 34.000-35.000. Sama halnya dengan BNI, saya minta itu tertulis nanti Pak, dalam rangka resesi domestiknya lagi lemah.

Terima kasih Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak, klarifikasi saja Bapak Ketua.

Tidak ada Bank Mandiri berasumsi, hanya membuat prediksi-prediksi perhitungan kalau terjadi seperti A, B, C, D. Jadi jangan sampai publik nanti yang mengutip salah, sama sekali tidak ada berasumsi.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Dia hanya memprediksi A, B, C, simulasi kira-kira.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Simulasi bukan memprediksi, beda Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan, ini memang harus hati-hati, kita paham sekali ini. Dan resesi itu berdasarkan ada ...(suara tidak jelas) tetapi yang tidak bisa diprediksi adalah ketika kondisi psikologisnya. Jadi saya kira ini harus hati-hati ini, ...(suara tidak jelas) seharusnya tidak bisa diungkapkan di publik. Ini penting saya kira saya tidak ikut rapat dengan Bank Mandiri waktu itu, karena saya kepada MK. Tapi menurut saya ini Pak, komunikasi ini sangat bahaya. Jadi sebetulnya ...(suara tidak jelas) Pun setahu saya tidak bisa diungkapkan ke publik karena itu ada banyak kondisi-kondisi termasuk asumsi-asumsi tetapi kita mengalami kalau lagi krisis itu yang paling tidak bisa dikendalikan adalah faktor psikologis.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi lagi, klarifikasi.

Tidak ada saling membuat seperti itu, hanya Bank Mandiri akan menjelaskan kalau nanti sudah FGD. Namanya FGD jadi bukan di rapat itu, jadi salah itu. Tidak ada Bank Mandiri membuat prediksi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Didi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kami mohon bila diperkenankan kami juga berkeinginan juga melakukan FGD dengan Komisi XI DPR RI untuk menjelaskan tadi materi-materi lebih detail lagi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Bagus itu Pak.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Didi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H.):

Sedikit, saya kira menyimak perdebatan barusan. Saya kira karena isunya sensitive, ada baiknya memang harus kita pilah-pilah walaupun tadi apa yang disampaikan dari seberang sana ada bila ditafsirkan demikian, tapi saya kira isu-isu yang strategis di FGD segera dalam waktu dekat. Tapi isu-isu yang disampaikan kawan-kawan saya kira sangat penting dan krusial harus kita bahas dan Komisi XI DPR RI bersama BNI wajib menelaahnya.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ketua, saya klarifikasi Ketua karena tadi banyak yang tadi kepada saya Bapak Ramson dan Bapak Didi. Saya kan hanya mengingatkan Pak, karena kita ini Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, mengingatkan bahwa resesi dunia ini berpengaruh kepada ekonomi domestik. Nah, apa kesiapan BNI bukan proyeksi Bapak Ramson. Maksud saya tidak usah Mandiri punya proyeksi atau bahasa ekonomi tadikan. Artinya, okelah kalau FGD tidak ada masalah setuju kita dengan FGD biar lebih dalam lagi.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan, ini Vera sekali Cuma mempertanyakan saja bahwa tadikan teman-teman membicarakan mengenai fintech. Bahwa di BUMN itu sebenarnya sudah ada link saja, sementara itu program unggulan. Saya tahu itu bagus sekali, karena itukan dalam rangka gerakan payment di Bank Indonesia sistemnya. Nah, ini tolong ditanyakan kepada partainya Bapak Eriko, ini Menteri BUMN mau kemana ini arahnya terhadap link saja. Karena kesiapan mereka pada BUMN ini sudah siap, jangan sampai ini tidak jelas. Ini sudah dibangun begitu bagus dengan Menteri yang lalu, saya tahu sekali bahwa ini luar biasa legacy-nya Menteri BUMN yang lalu dan Pemerintah. Saya mendukung kalau ini link saja karena saya yakin ini bagus sekali. Juga dulu itukan yang kita tahu ada pembayaran di Bank Indonesia itukan hanya terbatas, yang satu punya groupnya Visa. Di Indonesia itu hanya 3 pemainnya, tetapi ketika link saja bermain disini ini luar biasa. Jadi dulukan belum terpikirkan oleh Bank BUMN untuk melakukan penetrasi terhadap pengembangan produk ini.

Nah, sementara bank-bank ini sistemnya sudah bagus, sudah jalan, tapi akhirnya kita tidak jelas ini mau kemana. Jadi tolong ini kita akan pertanyakan karena kan dalam rangka kesiapan digitalisasi yang sudah mereka bentuk. Ini juga sangat sampai stagnan, kita mendukung programnya terus ditingkatkan. Apalagi tadikan kalau bilang pembayaran di beberapa maket place, Tokopedia, yang lain-lain kan BNI juga masuk. Tapi sebetulnya dengan produk ini saja kita tidak harus channeling, karena ini program legacy yang harus kita banggakan karena itu pemain cuma ada 3 di Indonesia. Itu yang punya Artha Group, satu lagi GPN, GPN itu pemainnya 3 tetapi ketika link saja inikan luar biasa. 5 besar digabung dengan bank-bank kecil BUMN ini sudah bisa melebihi dari yang pendahulunya.

Saya ingin mempertanyakan memang bukan di Komisi XI DPR RI, Komisi VI DPR RI. Namun, kita mempertanyakan program tersebut kaitannya dengan perbankan di Komisi kami, di Komisi XI DPR RI.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Kalau boleh dibicarakan di FGD itu Pak, karena sebetulnya kami siap untuk diskusi.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S.):

Bapak Ketua, ijin Pak.

Dari tadi sebenarnya saya sudah sampaikan mengenai transformation bisnis itu. Sebenarnya kaitan ini semua termasuk juga secure system-nya seperti apa. makanya nanti juga saran saya konkrit saja Ketua, dibagi saja nanti walaupun FGD

itu tidak, jadi jangan terlalu luas juga satu FGD membahas satu atau dua topik permasalahan sehingga itu bisa jauh lebih dalam pembahasannya. Nah, nanti khusus untuk yang namanya transformation bisnis itu, ini penting sekali nanti disiapkan betul-betul. Karena bisa saja nanti BNI harus menyiapkan direksi khusus untuk itu, karena kalau tidak nanti tidak bisa survive yang akan datang. Jangan dianggap perubahannya itu perubahan minimal. Luar biasa ini kadang-kadang tidak terprediksi perubahannya ini. seperti sekarang inikan batasannya Alibaba, apa sekarang semua sudah ini tidak bisa kita hempak. Nah, bagaimana BNI mensikapi itu termasuk secure systemnya Ketua.

Jadi kalau menjawab Ibu Vera, kebetulan Menteri BUMN bukan dari PDI Perjuangan. Nanti kalau pertemuan dengan Menteri BUMN kan dalam waktu dekat bisa nanti Ibu Vera tanyakan atau ke teman-teman tanyakan seperti apa. Jadi kita perlu tahu nanti Menteri BUMN kenapa cuma ada dua Wamen BUMN, kenapa tidak tiga, mungkin Mas AHY bisa masuk satu kan, kan tanggung kalau dua, harusnya tiga sesuatu yang genap kan kurang pas kalau ganjil kan. Jadi lima ya msti adil ya, dari Bank Mandiri ada, dari Bank BNI ada, kan begitu ya.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup ya.
Ada lagi Pak, sudah cukup ya.
Silakan Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Yang tadi, bagaimana pengaruh PSAK 71 terhadap kinerja tahun 2020.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tentu ada di FGD Pak, ada jelas.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saran saya didalam FGD Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S.):

Kalau yang tidak terakomodasi bisa tertulis dan di FGD Pak Ramson.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, karena beberapa case jadi FGD-nya bisa pakai jadwal gitu, lihat subjek-subjek yang mau dibahas.

Terima kasih Bapak Ketua, artinya jangan diborong semuanya di satu FGD, bisa 8 jam kecapean juga kita.

KETUA RAPAT:

Baik, demikianlah tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama Bank BNI. Sekarang kita masuk ke kesimpulan rapat.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Bank BNI, Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, Selasa 26 November 2019. Komisi XI DPR RI dan Bank Negara Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat menyepakati:

1. Bank Negara Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan upaya-upaya untuk menurunkan NPL maupun penyelesaian kasus perbankan yang terjadi.
2. Bank Negara Indonesia untuk mempermudah akses mendapatkan KUR dan meningkatkan penyaluran KUR dengan distribusi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.
3. Bank Negara Indonesia lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dengan menurunkan suku bunga kredit.
4. Bank Negara Indonesia akan lebih meningkatkan perannya dalam pemberian kredit pembiayaan pada sektor produktif ekonomi kerakyatan dan UMKM di seluruh Indonesia, serta mendukung hilirisasi produk Indonesia.
5. Bank Negara Indonesia berkomitmen terhadap program Pemerintah melalui pembedayaan ekonomi kerakyatan dan program sosial.
6. Bank negara Indonesia akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kerja.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan, itu nomor 4 saya kira sudah dijelaskan disini mengenai peningkatan peran pemberian kredit dan pembiayaan UMKM. Bahkan tadi Bank Mandiri tidak menyampaikan secara spesifik, mereka sangat terbuka. Jadi saya pikir itu didrop saja, karena mereka sudah berperan dalam UMKM. Kalau meningkatkan ya dalam tidak perlu secara spesifik. Tapi terserah, menurut saya karena memang mereka sudah menjalankan *business as usual*. Tadi kita tidak melihat di Bank Mandiri yang poin 4 itu.

KETUA RAPAT:

Oke, sekarang bahasanya lebih meningkatkan dan pemerataan. Oke, sekarang kembali ke satu dulu Sekretariat.

1. Bank Negara Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan upaya-upaya untuk menurunkan NPL maupun penyelesaian kasus perbankan yang terjadi.
Setuju?

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Saya kira bukan hanya NPL yang utamanya tetapi LDR-nya ini. Memperbaiki LDR-nya, karena itu sebetulnya kalau saya lihat itu yang harus menjadi perhatian utama untuk BNI.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ditambahin ini ya, Pak Harry apa tadi.

F-P. GERINDRA (Ir. HARRY POERNOMO):

Saya ingin mengoreksi saja, kata untuk itu apa tidak dicarikan suku kata yang lebih enak diucapkan. Yang lain kan menggunakan akan, bisa, agar juga boleh.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak, agar oke ya.

1. Bank Negara Indonesia agar meningkatkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan upaya-upaya untuk menurunkan LDR maupun penyelesaian kasus perbankan yang terjadi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Bapak Ketua.

Apa memang Bapak Dirut, LDR-nya sudah kritis. Permodalannya kan bagus saya lihat, struktu modalnya kuat, kenapa harus khusus itu.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Begini Pak, kalau LDR kita saat inikan tinggi, memang di atas 94. Tapi kalau dijelaskan tadi bahwa LDR dalam arti kata luas sebenarnya masih cukup aman, karena kami memiliki sumber dana. Cuma masalahnya tadi aturan OJK tetapi mempersyaratkan 94%.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

OJK ya, tapi mau meningkatkan kredit kan. Bagaimana mau mendorong pertumbuhan ekonomi equity-nya kan bagus saya lihat disini.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Tapi DPK-nya Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Iya DPK-nya ini masalah compliance bagaimana pun, makanya saya sarankan tadi dengan masukan itu kita bisa memberikan masukan kepada OJK di dalam aturannya sehingga membantu perbankan. Tapi namanya compliance too the rules kan sesuai, kalau tidak nanti akan bermasalah dan dibaca oleh industrinya. Kalau oleh analis kan memberikan analisis kan seperti demikian gitu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau saya sih Bapak Ketua, tidak setuju karena sekarang kan sudah kritis. Inikan keputusan ini kepada publik, padahal mau meningkatkan kredit, mau melonggarkan likuiditas ke sektor riil.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Sekaligus untuk memperbaiki, jadi menurunkan NPL dan memperbaiki LDR, sebetulnya disitu.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, kalau untuk memperbaiki LDR itu tidak semata-mata menurunkan kredit akan tetapi lebih kepada meningkatkan DPK-nya. Kalau sampai itu dianggap 96 itu sudah lebih dari rekomendasi atau yang ditetapkan oleh OJK 94, maka redaksionalnya jangan lagi agar, karena agar itu seolah-olah oleh saran, tetapi langsung action, yaitu akan.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Atau disebut meningkatkan DPK saja, karena kalau disebut LDR kan sekarang kan sudah kritis. Kalau yang baca dari luar yang pahami itu.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Kita minta masukan dari Bapak Baiquni.

KETUA RAPAT:

Makanya sebentar, sekarang item satu redaksionalnya kita sudah tahu semua kira-kira isinya apa. Redaksionalnya bagaimana menurut Bapak Baiquni.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Yang pertama Pak, mungkin bisa “akan meningkatkan kinerja”, tetapi ini tidak apa-apa agar. “agar meningkatkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan upaya-upaya untuk menurunkan NPL dan meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga”.

KETUA RAPAT:

Itu lebih pas.
“himpunan dana pihak ketiga”.

INTERUPSI:

Kalau Bapak Dirut sudah ngomong setuju saya Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saya kan paham apa kira-kira yang dipikirkan Bapak Dirut.

KETUA RAPAT:

Bank Negara Indonesia agar mempermudah akses mendapatkan KUR. Nomor 1 oke Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Sebetulnya sudah kami lakukan ini Pak, karena kalau kita lihat NIM kita sudah turun itu Pak.

KETUA RAPAT:

Kita drop saja, drop saja ya.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Maaf Pimpinan, saya terpaksa harus kembali ke atas. Itu yang dimaksud kalau tadikan khawatir, Bapak Ramson begitu khawatir bahwa nanti ada faktor psikologis ini. Jangan seolah-olah dikritis ini, NPL, LDR-nya harus diperbaiki. Tetapi kalimat yang terakhir “maupun penyelesaian kasus perbankan yang terjadi”. Apa itu kira-kira, apa tidak membuat orang kepikiran juga kalau baca ini.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Delete saja itu.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Apa ini kira-kira kasusnya yang terjadi.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Sebenarnya kami sudah, artinya kami memberikan latar belakang kepada media juga. Kami buka kepada media latar belakangnya seperti apa.

KETUA RAPAT:

Tidak masalah ya Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Ya, tidak masalah.

KETUA RAPAT:

Oke, dihilangkan, jadi DPK titik ya.
Oke, kita ulang ketok, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Yang 3 tadi sudah didrop ya, yang nomor 4 jadi nomor 3.

3. Bank Negara Indonesia akan lebih meningkatkan perannya dalam pemberian kredit pembiayaan pada sektor produktif ekonomi kerakyatan dan UMKM di seluruh Indonesia, serta mendukung hilirisasi produk Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. Bank Negara Indonesia berkomitmen terhadap program Pemerintah melalui pembedayaan ekonomi kerakyatan dan program sosial.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Bank negara Indonesia akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI maksimal 7 hari kerja.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan demikian telah kita sepakati bersama ya.

Baik, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Bank Negara Indonesia. Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat.

Sebelum kami tutup kami persilakan closing statement dari Bapak Baiquni. Silakan Pak.

DIRUT PT. BANK BNI (ACHMAD BAIQUNI):

Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan Sidang beserta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat pada siang sampai sore hari ini.

Kami atas nama rekan-rekan direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi XI DPR RI yang telah memberikan arahan-arahan kepada kami mengenai upaya-upaya yang harus kami lakukan di dalam kami meningkatkan kinerja, yang pertama.

Yang kedua, upata-upaya apa yang harus kami lakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan yang menjadi program-program Pemerintah. Dan kami terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan secara tertulis dan bila dimungkinkan maksimal nanti kami akan lebih intens dalam diskusi.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan mengucapkan *hamdallah, alhamdulillahil'alamin* Rapat Dengar Pendapat pada sore hari ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.26 WIB)

Jakarta, 26 November 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**

